

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh lapangan melalui data primer. Hasil data primer yang diperoleh dengan wawancara dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan implementasi program aplikasi BumilKu Kabupaten Kulon Progo di Kecamatan Nanggulan tahun 2019. Seluruh data akan dianalisis agar data yang diperoleh dapat diklarifikasi dengan lebih sederhana dan digambarkan dengan kata yang mudah dipahami.

BumilKu merupakan aplikasi untuk layanan kesehatan yang ditunjukkan kepada ibu hamil yang dikembangkan untuk memberikan pelayanan dasar yang diterapkan di setiap puskesmas yang berada di Kabupaten Kulon Progo. BumilKu merupakan bagian modul aplikasi pendukung *Smart City* yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam pelayanan *e-Governemnt* berjenis *Government to Citizen*.

Aplikasi BumilKu merupakan wujud dari penerapan teknologi informasi yang diharapkan memberikan konsttribusi yang besar dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada ibu hamil. Layanan aplikasi BumilKu juga dapat memudahkan kinerja Dinas Kesehatan dalam memonitoring rekam medis kesehatan ibu hamil dan kandungan. Dari hasil wawancara dengan pengembang aplikasi BumilKu sekaligus menjadi admin utama, berikut wawancara dengan bapak Zauhari sebagai Kepala Pengembangan Aplikasi BumilKu Kabupaten Kulon Progo :

“Aplikasi BumilKu merupakan aplikasi untuk mempermudah upaya Dinkes untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada ibu hamil oleh bidan

selaku pengguna aplikasi BumilKu secara online. bumilKu ini adalah bagian modul dari smart city Kabupaten Kulon Progo.”

Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan ibu Arita selaku Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo :

“Aplikasi BumilKu itu merupakan penggunaanya berupa teknik informasi yang bertujuan untuk penanganan ibu hamil secara efektif dan optimal serta untuk mengurangi angka kematian ibu hamil di Kabupaten Kulon Progo.”

A. Implementasi Aplikasi Pelayanan BumilKu Di Kecamatan Nanggulan

Dari hasil implementasi akan menghasilkan suatu *output*, *output* implementasi aplikasi BumilKu berupa dengan adanya pelaksanaan aplikasi pelayanan BumilKu untuk ibu hamil dan kandungan. Variabel implementasi aplikasi pelayanan BumilKu yang ditulis oleh penulis menggunakan teori dari unsur Prinsip Pelayanan Publik berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.25/KEP/M.PAN/2/2004. Parameter prinsip pelayanan dalam aplikasi pelayanan BumilKu yang digunakan oleh penulis yaitu : akurasi, kemudahan akses, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, keamanan pelayanan, dan kelengkapan sarana dan prasarana.

1. Akurasi

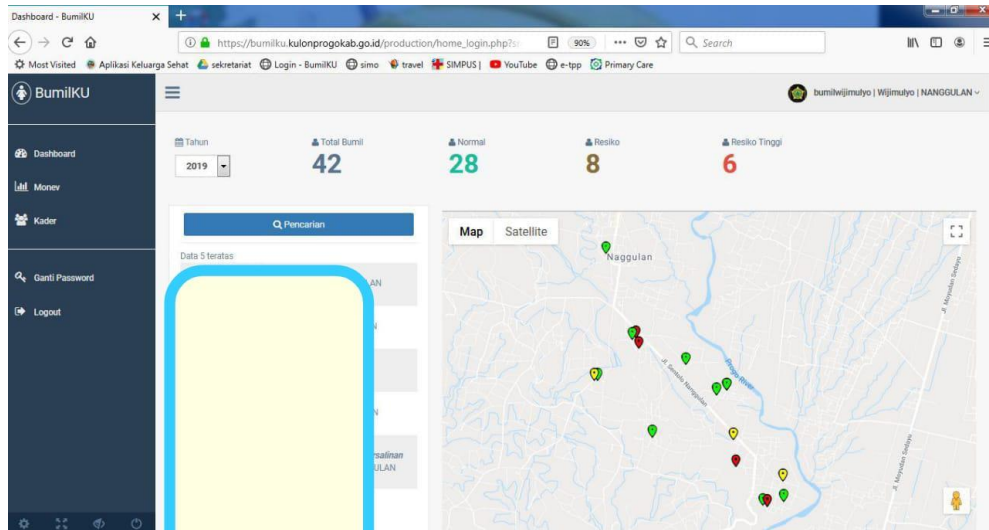
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Hal tersebut mengartikan bahwa penerima pelayanan aplikasi BumilKu harus benar dalam pelayanannya, tepat siapa yang harus menerima pelayanannya, serta sah sesuai SOP

pelayanan aplikasi BumilKu. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kartika selaku teknis pelaksanaan BumilKu puskesmas kecamatan Naggulan :

“Dalam akurasi, kami memberikan pelayanan secara benar sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dan kandungannya, tepat pada siapa harus memberikan pelayanannya kami dibantu dengan titik koordinat dalam aplikasi BumilKu untuk mengetahui siapa dan dimana tempat tinggal yang memerlukan pelayanan aplikasi BumilKu, dalam pelayanan aplikasi BumilKu kami memiliki pedoman sah yang sesuai dengan SOP yang berbentuk draft”

Melakukan pelayanan dengan benar sesuai dengan kemampuan dan keahlian kerja dalam melayani ibu hamil serta kewenangan bidan tertentu yang bertugas dalam aplikasi pelayanan BumilKu, karena setiap bidan yang ditunjuk sebagai admin BumilKu diberikan pelatihan atau pendidikan terlebih dahulu sebelum ditugaskan untuk melayani ibu hamil dengan menggunakan aplikasi pelayanan BumilKu.

GAMBAR 3.1
TAMPILAN MAP PADA APLIKASI BUMILKU



Dalam sisi tepat, aplikasi BumilKu memiliki map serta titik koordinat seperti gambar diatas, dimana titik koordinat tersebut mengarahkan admin/bidan ke alamat rumah ibu hamil yang terdaftar dalam aplikasi BumilKu bertujuan untuk

admin/bidan berkunjung secara langsung ke rumah, guna memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan kandungannya. Titik koordinat tersebut memiliki warna berbeda-beda. Titik koordinat berwarna hijau menunjukkan kondisi ibu hamil dan kandungannya dalam kondisi normal, titik koordinat berwarna kuning menunjukkan kondisi ibu hamil dan kandungannya beresiko, sedangkan titik koordinat berwarna merah menunjukkan beresiko tinggi. Dalam pelaksanaan aplikasi pelayanan BumilKu yang sah dilapangan berpedoman pada SOP dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor.188.4/7676 tentang Penunjukan Tim dan Pembentukan Sistem Aplikasi BumilKu Dalam Upaya Akselerasi Penurunan AKI dan AKB Tahun 2018.

Analisis parameter akurasi dalam prinsip aplikasi pelayanan BumilKu ini sudah ada dengan keadaan bagus seperti benar dalam memberikan pelayanan karena orang yang memberikan pelayanan aplikasi BumilKu tersebut hanya bidan yang diberikan pelatihan atau pendidikan untuk menggunakan aplikasi BumilKu. Dalam ketepatan memberikan pelayanan, dengan adanya titik koordinat pada aplikasi BumilKu membantu bidan/admin dalam memberikan pelayanan dan penanganan secara langsung dilapangan dengan cara mengunjungi alamat rumah ibu hamil yang terdaftar yang tercantum dalam aplikasi BumilKu. Sedangkan dalam point sah aplikasi pelayanan BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan sudah memiliki SOP dalam pelaksanaannya. Namun SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan masih memiliki kekurangan berupa masih belum diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi sarana dan prasarana pelayanan yang memadai mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Dalam aplikasi pelayanan BumiKu yang berbasis *e-government* hal kemudahan akses merupakan yang paling utama dalam memberikan pelayanan, karena aplikasi BumiKu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang memudahkan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan dari bidan sebagai admin aplikasi BumiKu. Berikut hasil wawancara dengan mbak Putri selaku Bidan pelaksanaan BumiKu Desa Wijimulyo :

“Kemudahan akses yang kami berikan untuk pelayanan aplikasi BumiKu kepada ibu hamil berupa mendapatkan pelayanan dari bidan yang mengunjungi ibu hamil sesuai dengan titik koordinat yang ada pada aplikasi BumiKu. Dan bidan dibantu oleh kader BumiKu ditingkat Dusun”

Bahwa kemudahan akses pelayanan aplikasi BumiKu sudah direncanakan oleh pihak-pihak terkait, guna memberikan pelayanan yang optimal kepada ibu hamil serta mengurangi hal yang tidak diinginkan kepada ibu hamil dan kandungannya dengan *output* mengurangi angka kematian ibu hamil, dan resiko keguguran semasa mengandung dengan tersedianya kader BumiKu disetiap Dusun.

Kemudahan yang dirasakan oleh kader dengan adanya aplikasi BumiKu di Dusun Temanggal ibu Yanti dengan adanya aplikasi BumiKu, sebagai berikut :

“saya mendapatkan kemudahan dengan adanya aplikasi bumilku, berupa adanya map dan bisa otomatis terhubung ke server bidan bila ada keluhan oleh ibu hamil.”

Kader yang diberikan wewenang untuk mengelola server aplikasi BumilKu mendapatkan dampak kemudahan. Sebelum adanya aplikasi BumilKu, kader harus memberikan keluhan ibu hamil ke bidan secara manual dengan memberikan catatan. Dengan adanya aplikasi BumilKu pada akhir tahun 2018, kader merasakan dampak kemudahan untuk bekerjasama dengan bidan dalam memberikan pelayanan dengan mencatat keluhan yang dialami ibu hamil menggunakan aplikasi BumilKu dapat diterima dengan otomatis kepada bidan penanggung jawab ditingkat Desa.

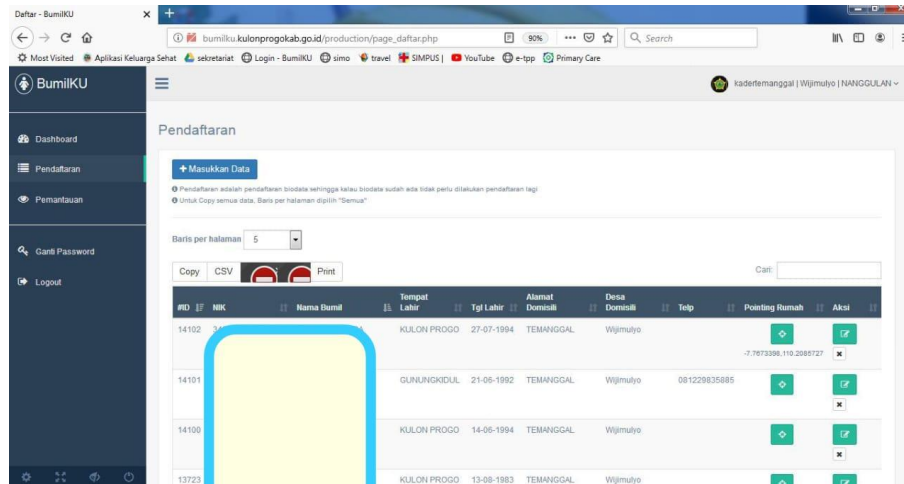
Analisis parameter kemudahan akses pelayanan aplikasi BumilKu diatas menunjukkan dalam keadaan yang sudah cukup bagus untuk mendukung kemudahan pelayanan aplikasi BumilKu yang didukung bidan/admin yang ditugaskan langsung dilapangan untuk memberikan pelayanan atau penanganan ibu hamil ditugaskan memberikan secara langsung ke tempat tinggal ibu hamil tersebut dan bantuan dari kader. Kader juga mendapatkan dampak dengan adanya aplikasi BumilKu dalam membantu kinerja bidan.

3. Persyaratan Pelayanan

Kemudahan tahapan persyaratan pelayanan berjenis *Government to Citizen* lebih mudah dalam tahap administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. Persyaratan dalam aplikasi pelayanan BumilKu pada dasarnya sama seperti pelayanan lainnya, bedanya aplikasi pelayanan BumilKu tahap persyaratannya lebih mudah tanpa menghambat banyak waktu. Berikut hasil wawancara dengan Mbak Putri selaku teknis pelaksanaan BumilKu Desa Wijimulyo :

“Dalam tahap persyatan pelayanan aplikasi BumilKu, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan aplikasi BumilKu cukup mendaftar *online* dengan cara menginput nama, NIK, dan alamat. Hal tersebut dibantu oleh kader yang ditempatkan disetiap dusun di kecamatan Nanggulan.”

GAMBAR 3.2
TAMPILAN PENDAFTARAN APLIKASI BUMILKU DI NANGGULAN



Dalam persyaratan administratif aplikasi pelayanan BumilKu, ibu hamil sebagai sasaran yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut tidak perlu mendaftar ke puskesmas Nanggulan. Dikarenakan pendataan administratif dalam persyaratan tersebut dilakukan oleh kader yang secara langsung berkunjung ke rumah ibu hamil yang ingin mendaftar. Persyaratannya hanya mengisi data diri berupa nama, NIK, dan alamat rumah seperti pada gambar 3.2 *screenshot* aplikasi BumilKu.

Penanggung jawab kader BumilKu ditingkat Dusun Temanggal, Ibu Yanti berpendapat sebelum adanya aplikasi BumilKu beliau harus mencatat keluhan ibu hamil secara manual dalam buku. Berikut wawancaranya :

“Saya salah satu kader dari sebelum adanya aplikasi BumilKu sampai sekarang. Setelah adanya BumilKu saya merasakan kemudahan dalam membantu ibu hamil dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkannya.”

Sebelum adanya aplikasi BumilKu, kader BumilKu dalam membantu pelayanan yang dibutuhkan ibu hamil kader harus mencatat secara manual apa pelayanan yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan persyaratan pelayanan ditulis secara manual. Hal tersebut memudahkan kinerja kader untuk membantu bidan maupun membantu pelayanan yang dibutuhkan ibu hamil.

Sebelum adanya aplikasi BumilKu, Ibu Cindy yang mengalami sebelum dan setelah mendapatkan pelayanan BumilKu yang bertempat tinggal di Dusun Temanggal berpendapat bahwa :

“Sebelum adanya aplikasi BumilKu saya harus melakukan pendaftaran untuk pengecekan kandungan berkunjung ke bidan maupun puskesmas. Setelah adanya BumilKu, saya mendapat kemudahan pendaftaran karena kader berkunjung ke rumah dan persyaratanya cukup mudah.”

Analisis hasil wawancara Ibu Cindy dalam persyaratan pelayanan, terlihat perbandingan sebelum adanya aplikasi BumilKu dan setelah adanya aplikasi BumilKu. Beliau harus berkunjung untuk mendaftar setiap ingin mendapatkan pelayanan selama hamil ke bidan atau puskesmas untuk mendapatkan pelayanan, dari pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan beliau harus mengantre dengan ibu hamil lainnya yang sudah mendaftar ke bidan atau puskesmas. Setelah adanya aplikasi BumilKu, beliau merasakan dampak kemudahan dalam persyaratan pelayanan karena adanya kader yang mendata untuk memasukan data diri untuk mendapatkan pelayanan BumilKu. Beliau cukup mengisi data diri satu kali dalam aplikasi BumilKu untuk mendapatkan pelayanan sampai hari perkiraan lahir.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis, bahwa persyaratan untuk mendapatkan pelayanan aplikasi BumilKu bisa dibilang mudah cukup dengan

mengisi nama, NIK, dan alamat tempat tinggal ibu hamil dan tanpa harus mengunjungi puskesmas, karena kader bertugas yang ditempatkan di setiap Dusun akan mendata serta menempelkan sticker titik koordinat dengan menghasilkan titik koordinat pada map yang tersedia pada aplikasi BumilKu seperti pada gambar 3.1 tempat tinggal ibu hamil yang sudah terdaftar pada aplikasi BumilKu, bidan bisa memberikan pelayanan secara langsung dengan cara mengunjungi tempat tinggal ibu hamil yang ingin mendapatkan pelayanan aplikasi BumilKu. Dampak yang dirasakan dari bidan, kader maupun ibu hamil dengan adanya BumilKu mereka mendapat kemudahan dilapangan.

4. Kejelasan Petugas Pelayanan

Hal penting dalam sebuah pelayanan publik berupa kejelasan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. Hal tersebut meliputi nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Dalam aplikasi pelayanan BumilKu, ibu hamil yang mendapatkan aplikasi pelayanan ini diberikan pelayanan oleh bidan sedangkan kader bertugas sebagai yang membantu kinerja bidan di tingkat dusun.

Berikut wawancara dengan Ibu Putri :

“Bidan yang menangkap sebagai pemberi pelayanan dan admin aplikasi BumilKu yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil dilapangan. Serta adanya kader aplikasi BumilKu di kecamatan Nanggulan sebagai pendamping kepada ibu hamil dan membantu kinerja bidan di tingkat dusun.”

TABLE 3.1
NAMA BIDAN APLIKASI BUMILKU

No	Nama Bidan	Jabatan	Tempat Pelayanan
1	Anita Nurvida, A.Md.Keb	Bidan	Desa Tanjungharjo
2	Restu Adriyati, A.Md.Keb	Bidan	Desa Donomulyo
3	Kustanti Eka Saputri, A.Md.Keb	Bidan	Desa Wijimulyo
4	Setiana Kurniawati, A.Md.Keb	Bidan	Desa Jatisarone
5	Titin Wulandari, A.Md.Keb	Bidan	Desa Banyuroto
6	Iin Indrawati, A.Md.Keb	Bidan	Desa Kembang

Tabel diatas menunjuk nama dan tempat pelayanan yang diberikan oleh bidan yang menggunakan aplikasi BumilKu yang ditugaskan disetiap Desa nya masing-masing. Sedangkan kader aplikasi BumilKu ada disetiap dusun di Kecamatan Nanggulan yang terdiri dari 61 Dusun dan 61 kader. Masing-masing dari bidan maupun kader BumilKu memiliki *username* nya masing-masing untuk *login* dan melakukan pelayanan terhadap ibu hamil yang terdaftar.

Kader bidan yaitu Ibu Putri yang bertugas di puskesmas Nanggulan untuk memberikan arahan atau pelatihan kepada bidan maupun kader BumilKu di Kecamatan Nanggulan. Selain itu, kader bidan di tingkat Kecamatan bertugas untuk melakukan monitoring evaluasi yang dilakukan satu bulan sekali terhadap bidan maupun kader BumilKu.

Bidan BumilKu ditempatkan disetiap Desa di Kecamatan Nanggulan Bidan yang bertugas dalam pengawasan, pemberi pelayanan atau penanganan langsung dan bertanggung jawab atas rekam medis ibu hamil dan kandungan sampai pendampingan hari lahir. Sedangkan kader aplikasi BumilKu hanya memiliki kewenangan untuk pendampingan kepada ibu hamil yang ingin terdaftar dalam aplikasi pelayanan BumilKu dan membantu kinerja bidan ditingkat dusun.

Kader bidan di puskesmas Nanggulan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan maupun kendala yang terjadi dilapangan kepada Dinas Kesehatan. Sedangkan bidan selaku admin yang memberikan pelayanan BumilKu bertanggung jawab kepada kader bidan puskesmas Nanggulan untuk melaporkan kegiatannya di lapangan. Kader BumilKu memiliki tanggung jawab dalam membantu kinerja bidan BumilKu dan melaporkannya bilamana ada kendala maupun resiko yang terjadi kepada ibu hamil.

Untuk segi kewenangan, kader bidan BumilKu di Puskesmas Nanggulan memiliki kewenangan untuk mengetahui kinerja atau pelayanan yang dilakukan oleh bidan dan kader dilapangan, dan berwenang dalam melakukan *monitoring evaluasi* yang diselenggarakan satu bulan sekali. Kewenangan bidan BumilKu dalam pelaksanaan dilapangan berupa memberikan pelayanan seara langsung kepada ibu hamil dan penanganan. Sedangkan kader BumilKu ditingkat Dusun hanya memiliki kewenangan dalam membantu kinerja bidan berupa mendata ibu hamil yang ingin terdaftar BumilKu.

Analisis dari parameter kejelasan petugas pelayanan aplikasi BumilKu di Kabupaten Kulon Progo khususnya di UPTD puskesmas Kecamatan Nanggulan sudah cukup memiliki kejelasan dan kepastiannya dalam membeikan pelayanan kepada ibu hamil. Dari segi masing-masing yaitu nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab yang terjadi dilapangan data hasil wawancara maupun dokumen yang tercantum sudah sesuai deng an prinsip pelayanan publik.

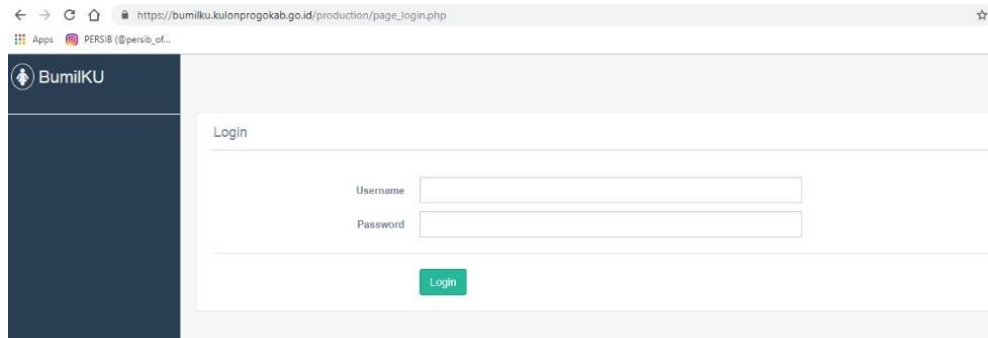
Parameter dari kejelasan petugas pelayanan aplikasi BumilKu dipengaruhi oleh variabel faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi BumilKu dari parameter sumber daya kewenangan dan parameter struktur birokrasi yang sudah tersusun dan jelasnya dari masing-masing parameter tersebut, sehingga dalam kejelasan petugas pelayanan sudah bisa dikatakan sudah baik dalam merencanakannya.

5. Keamanan Pelayanan

Keamanan pelayanan yang dimaksud dalam aplikasi pelayanan BumilKu di kabupaten Kulon Progo yang berbasis *e-government* berbeda dengan pelayanan publik lainnya secara manual. Keamanan pelayanan aplikasi BumilKu berupa keamanan rekam medis, dan data diri. Hal tersebut bersangkutan dengan penerima aplikasi pelayanan BumilKu yaitu ibu hamil dan kandungannya. Keamanan tersebut hanya bisa diakses oleh beberapa orang seperti admin utama, admin/bidan, dan kader. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Putri :

“Masalah keamanan pelayanan aplikasi BumilKu sangat sensitif dikarenakan menyangkut dengan rekam medis dan data diri ibu hamil. Hal tersebut hanya bisa diakses oleh admin utama, admin/bidan, dan kader. Tidak bisa diakses oleh sembarang orang”

GAMBAR 3.3
TAMPILAN AWAL APLIKASI BUMILKU



Gambar diatas merupakan tampilan untuk login aplikasi BumilKu, aplikasi BumilKu hanya bisa diakses oleh admin utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu bapak Zauhari sebagai pengatur server, Kader koor bidan Puskesmas, Bidan, yang memberikan pelayanan secara langsung. Kader hanya bisa mengakses data diri pendaftaran aplikasi pelayanan BumilKu, dan memasukan keluhan yang ibu hamil rasakan. Analisis parameter keamanan pelayanan yang diberikan oleh pihak implementor maupun pelaksana aplikasi pelayanan BumilKu sangat terjamin keamanan penerima aplikasi pelayanan BumilKu dikarenakan untuk *login* aplikasi BumilKu hanya bisa diakses oleh beberapa orang yang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya.

Indikator keamanan yang sudah terjamin keamanan aplikasi BumilKu dipengaruhi parameter oleh SOP yang menjadi pedoman dalam implementasi aplikasi BumilKu yang tercanum dalam Peraturan Bupati No. 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *e-Government* terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) poin d berisi menjamin keamanan informasi sistem secara internal.

Dari pembahasan diatas dapat analisis bahwa implementasi aplikasi pelayanan BumilKu yang diambil dari prinsip pelayanan dalam pelaksanaanya

sudah cukup baik. Ada empat prinsip pelayanan yang sudah sesuai dengan prinsip pelayanan yang sesuai dengan pelayanan *e-government* yaitu, akurasi, kemudahan akses, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas dan keamanan pelayanan. Kendati demikian, yang membedakan aplikasi pelayanan BumilKu dengan pelayanan lainnya adalah Akurasi.

6. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan BumilKu, peralatan kerja dan pendukung lainnya dalam aplikasi pelayanan BumilKu di Kabupaten Kulon Progo termasuk penyediaan sarana teknologi dan informatika (Telematika). Berikut hasil Wawancara dengan Ibu Ika selaku koordinator Bidan BumilKu di Puskesmas Nanggulan :

“Pelayanan aplikasi BumilKu yang dijalankan di Puskesmas Nanggulan hanya berupa Smartphone untuk mengakses dalam server BumilKu, posyandu ditingkat Desa, dan Puskesmas Nanggulan untuk memberikan pelayanan lebih lanjut.”

Hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa kelengkapan sarana dan prasana untuk menjalankan aplikasi BumilKu di Kecamatan Nanggulan berupa *smartphone* yang digunakan oleh bidan maupun kader untuk memberikan pelayanan kepada ibu hamil dengan cara mengaksesnya. Posyadu ditingkat Desa dalam implementasi aplikasi BumilKu, digunakan untuk memberikan pelayanan oleh Bidan yang dibantu kader kepada ibu hamil. Sedangkan puskesmas dalam penggunaannya berupa untuk memberikan penanganan yang lebih intensif kepada ibu hamil.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Aplikasi Pelayanan BumilKu Kabupaten Kulon Progo

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi merupakan tindakan dari rencana yang sudah disusun secara rinci dan matang oleh implementor dan biasanya implementasi dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap layak. Dalam pelaksanaan implementasi ada faktor-aktor yang mempengaruhi terhadap suatu implementasi berupa komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

Dalam faktor-faktor implementasi aplikasi pelayanan BumilKu, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku *development server* dan penanggung jawab *server* aplikasi BumilKU dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan dari Dinas Kesehatan sebagai implementor, penerima aplikasi/*server* BumilKu dan sebagai penyesuaian kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan aplikasi pelayanan BumilKu di Kabupaten Kulon Progo.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu pelaksanaan aplikasi BumilKu dilihat dari cara peimplementasian aplikasi BumilKu tersebut oleh pihak implementor dengan tujuan aplikasi pelayanan BumilKu terimplemtasikan dengan baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan. Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap implementasi aplikasi BumilKu yang menggunakan teori George C. Edward III akan ditentukan oleh banyaknya faktor atau variabel yang saling berhubungan satu sama lain yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi.

Sehingga dalam sub bab pembahasan ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi BumilKu di Kabupaten Kulon Progo khususnya di UPTD Puskesmas Nanggulan dengan menerapkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan.

1. Komunikasi

Dalam hal ini, dapat dipaparkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi suatu program harus memiliki keahlian dalam berkomunikasi serta mengetahui apa yang harus dilakukan, agar mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas, mencapai keberhasilan serta untuk mensyaratkan implementor dalam pelaksanaan program yang diinginkan sehingga memiliki dampak yang bagus dan masyarakat mendapatkan kepuasan pelayanan terhadap implementasi aplikasi pelayanan BumilKu. Maka parameter untuk mengetahui indikator dari komunikasi yaitu :

1.1 Transmisi

Parameter ini diperlukan bahwa pengimplementasian suatu program harus disampaikan oleh implementor kepada kelompok sasaran program yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari hasil wawancara dengan Ibu Dyah Setianingrum Kepala Bidang Penyiap Bahan Pemenuhan Kesehatan Keluarga dan Gizi mengatakan :

“Dalam transmisi implementasi aplikasi BumilKu pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan sosialisasi secara langsung kepada kepala Puskesmas tiap Kecamatan serta bidan-bidan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan aplikasi BumilKu serta diajarkan untuk menginput aplikasi BumilKu. Dari pihak kelompok sasaran, Dinas Kesehatan hanya mensosialisasikan kepada kader BumilKu yang baru ada di Kecamatan Nanggulan”

GAMBAR 3.4
SOSIALISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KULON PROGO



Sosialisasi Telemedicine dan Aplikasi Bumilku

SUMBER : [HTTPS://KOMINFO.KULONPROGOKAB.GO.ID](https://kominfo.kulonprogokab.go.id)

Ungkapan Ibu Dyah diatas dapat dianalisis bahwa transmisi implementasi aplikasi BumilKu dengan cara penyampaian sosilaisasi aplikasi BumilKu secara langsung dalam keadaan baik dengan penyampaiannya kepada pelaksana aplikasi BumilKu yaitu Direktur RSUD Wates, kepala Puskesmas Kecamatan seluruh Kabupaten Kulon Progo serta bidang-bidan disetiap Puskesmas per-Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

Transmisi yang dilakukan oleh bidan dan kader BumilKu untuk mensosialisasikan kepada ibu hamil yang ingin menggunakan aplikasi BumilKu bidan dan kader melakukan sosialisasi pada setiap bulannya yang dilakukan posyandu dusun. Berikut hasil wawancara dengan Mbak Putri pelaksana bidan Desa Wijimulyo :

“saya melakukan sosialisasi secara langsung terhadap ibu hamil ditingkat dusun yang dibantu oleh kader. untuk memberikan informasi mengenai aplikasi BumilKu.”

Analisis wawancara tersebut menyatakan bahwa transmisi yang dilakukan oleh bidan maupun kader BumilKu kepada ibu hamil dilakukan secara langsung, guna menghindari ketidak pahaman kepada ibu hamil yang ingin menggunakan pelayanan aplikasi BumilKu serta . Kegiatan transmisi tersebut dilakukan setiap 1 bulan sekali yang dilakukan di posyandu Dusun.

Hal transmisi yang dilakukan oleh pihak implementor maupun pihak pelaksana aplikasi BumilKu di Kecamatan Nanggulan berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi indikator-indikator implementasi pelaksanaan aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan.

1.2 Kejelasan

Kejelasan menghendaki agar suatu implementasi yang ditransmisikan kepada pelaksana target group serta pihak lainnya yang berkepentingan dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud tujuan, sasaran dan substansi dari implementasi aplikasi BumilKu sehingga akan mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan untuk mensukseskan implementasi aplikasi BumilKu dengan efektif dan efisien. Hasil wawancara dengan Ibu Arita dimana beliau selaku pembicara kegiatan sosialisasi aplikasi BumilKu :

“Dalam acara/kegiatan transmisi sosialisasi yang dihadiri oleh pelaksana yang berkaitan aplikasi BumilKu seperti kepala RSUD Wates, kepala Puskesmas seluruh Kabupaten Kulon Progo serta bidang-bidang disetiap Puskesmas per-Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dijelaskan secara

rinci dan mendalam perihal aplikasi BumilKu untuk sasaran, tujuan, dan target pengguna. Dalam sosialisasi itu juga kami menjelaskan bagaimana cara kinerja aplikasi BumilKu. Serta adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penggunaan aplikasi BumilKu”

Transmisi yang jelas akan menghasilkan program/aplikasi BumilKu yang berjalan sesuai rencana awal serta memiliki *output* yang jelas. Dalam mewujudkan implementasi aplikasi BumilKu dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan memiliki kejelasan dalam mentransmisikan suatu program yang berupa aplikasi BumilKu kepada pelaksana dan target *group*.

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa cara transmisi aplikasi BumilKu yang disampaikan salah satunya oleh ibu Arita dengan cara penyampaian yang jelas sasaran, tujuan, dan target groupnya serta bagaimana cara penggunaan maupun kinerja aplikasi BumilKu. Selain itu, dari pihak Dinas Kesehatan melakukan transmisi ke puskesmas per-Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam parameter kejelasan yang mencakup tujuan, sasaran dan substansi mempengaruhi parameter akurasi implementasi aplikasi BumilKu. Parameter ini sudah bisa dikatakan dengan keadaan yang baik sehingga mempengaruhi terhadap implementasinya yang sudah berjalan sesuai dengan mengetahui sasaannya. Parameter kejelasan ini salah satunya mempengaruhi implementasi aplikasi BumilKu pada parameter akurasi dengan adanya *future* titik koordinat pada aplikasi BumilKu, sehingga menghasilkan pada sasaran pengguna aplikasi BumilKu.

1.3 Konsistensi

Diperlukannya konsistensi agar kebijakan/implementasi aplikasi tidak menjadi simpang siur sehingga bisa membingungkan pelaksana kebijak/ implementasi, target group maupun dari pihak-pihak lainnya. Implementor yang bisa memberikan konsisten pada kebijakan/implementasinya akan berjalan dengan baik serta bisa memberikan kepuasan pelayanan kepada target group. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dyah :

“Konsistensi yang diberikan oleh kami (implementor) sering mengecek pelaksanaan secara langsung ke lapangan yaitu ditiap puskesmas per-Kecamatan, apakah ada kendala maupun kekurangan dalam menjalankannya. Adanya evaluasi monitoring BumilKu berkala untuk memantau setiap 6 bulan sekali, serta memberikan sosialisasi lainnya ke setiap puskesmas dan bidan pengguna aplikasi BumilKu setiap 1 bulan sekali.”

Konsistensi yang diberikan oleh implementor berupa konsistensi melakukan kegiatan untuk mengecek kinerja pelaksana lapangan aplikasi BumilKu yang ditunjuka kepada bidan, dan melakukan monitoring evaluasi yang dilakukan setiap pelaksanaan maupun setiap 6 bulan sekali. Dengan memiliki konsistensi maka suatu pelaksanaan aplikasi BumilKu akan berjalan sesuai dengan tujuan pelaksanaan program tersebut.

Konsistensi yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas terhadap aplikasi BumilKu yaitu dengan adanya kader BumilKu yang dilakukannya monitoring evaluasi setiap 1 bulan sekali untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh kader dalam membantu bidan dilapangan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ika :

“Kader BumilKu di Nanggulan dilakukan monev untuk mengetahui kendala dalam menjalankan tugasnya dilapangan.”

GAMBAR 3.5
MONEV PELAPORAN KADER



SUMBER : [HTTPS://PUSKESMASNANGGULAN.COM/GALLERY/#](https://puskesmasnanggulan.com/gallery/#)

Dalam kegiatan diatas, Ibu Ika selaku pembicara bidan koordinator Puskesmas Nanggulan dilakukan monitoring evaluasi setiap 1 bulan sekali terhadap kader untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dilapangan.

Implementor BumilKu sudah memiliki konsistensi yang diterapkannya dalam menjalankan aplikasi BumilKu, untuk memberikan suatu pelayanan optimal dengan cara mengecek rekam medis ibu hamil melalui aplikasi BumilKu serta melakukan *monitoring evaluasi* secara berkala di puskesmas setiap Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan sebuah faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan/program. Bilamana implementor terhalang dibagian

sumberdaya, maka implementasi kebijakan/program tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumber daya finansial/anggaran, dan sumberdaya kewenangan.

2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan terlaksananya implementasi kebijakan/program. Tidak pentingnya seberapa jelas dan konsisten pelaksanaan implementas, jika memiliki personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan implementasi kebijakan/program tidak memiliki sumberdaya untuk melakukan pekerjaannya maka tidak akan berjalan dengan rencana awal. Dalam pemanfaatan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku implementor BumilKu, Ibu Dyah selaku Kepala Bidang Penyiap Bahan Pemenuhan Kesehatan Keluarga dan Gizi mengatakan :

“Sumber daya manusia dalam pelaksanaan aplikasi BumilKu dengan cara memberikan pendidikan kepada bidan maupun kader dengan sosialisasi pendampingan ke setiap puskesmas di Kabupaten Kulon Progo secara berkala. Untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang aplikasi BumilKu guna memberikan pelayanan yang optimal kepada ibu hamil.”

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas terlebih dahulu diberikan pendidikan untuk bidan maupun kader, guna untuk memahami kinerja serta penggunaan aplikasi BumilKu untuk pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil.

GAMBAR 3.6
SOSIALISASI KADER APLIKASI BUMILKU KECAMATAN NANGGULAN



SUMBER: [HTTPS://PUSKESMASNANGGULAN.COM/GALLERY/](https://puskesmasnanggulan.com/gallery/)

Dapat dianalisis bahwa sumber daya manusia dalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi aplikasi BumilKu diberikan pelatihan/pelajaran kepada bidan maupun kader untuk mampu menggunakan aplikasi BumilKu guna memberikan pelayanan yang optimal. Berbagai cara oleh implementor untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi aplikasi BumilKu ini dengan cara memberikan pendampingan atau sosialisasi ke setiap puskesmas Kabupaten Kulon Progo.

Sumber daya manusia ini dalam faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pada implementasi aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan terhadap kejelasan petugas pelayanan BumilKu yang sudah mampu memberikan pelayanan dengan menggunakan aplikasi BumilKu.

2.2 Sumber Daya Finansial atau Anggaran

Dalam parameter ini dimaksudkan bahwa sumber daya anggaran atau finansial yang terbatas akan menghambat maupun tidak berjalannya suatu kebijakan/program yang direncanakan sejak awal. Minimnya anggaran atau finansial untuk suatu implementasi program/kegiatan bisa membatasi kualitas layanan yang disediakan oleh implementor kepada publik.

2.2.1 Sumber Daya Finansial Implementasi Aplikasi BumilKu di Kabupaten Kulon Progo

Untuk implementasi aplikasi BumilKu yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Kesehatan maupun Dinas Kesehatan menggunakan finansial dari APBD. Berikut Wawancara dengan Bapak Zauhari :

“Untuk implementasi aplikasi BumilKu kami (development server) mendapatkan dana dari APBD dan dipergunakan untuk penyediaan server dan perawatan server. APBD yang digunakan untuk aplikasi BumilKu melancarkan kegiatan BumilKu.”

TABLE 3.2
SUMBER DAYA FINANSIAL DEVELOPMENT APLIKASI BUMILKU

Tujuan	Program Kerja	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Sumber Biaya	Jumlah Biaya (Rp)	Pelaksana	Mitra	Timeline
Meningkatkan Kualitas Manajemen Birokrasi Yang Efisien	Inovasi : Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Integritas layanan publik berbasis GIS (BumilKu)	Persentase aplikasi layanan publik dalam dashbord GIS kinerja daerah	APBD	50.000	Diskominfo	Dinkes	2018-2019
Meningkatkan Akses Masyarakat Kulon Progo Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Terjangkau	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Inovasi : Pengembangan Aplikasi BumilKu Terintegrasi Dengan Layanan Faksas	Persentase data ibu hamil yang terdeteksi HPL, faktor resiko, koordinat rumah oleh bidan secara online	APBD	112.000	Dinkes	Diskominfo	2021-2023

SUMBER : BUKU III EXECUTIVE SUMMARY MASTER PLAN SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018-2028

Penggunaan APBD dalam implementasi aplikasi BumilKu di Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk penyediaan *server* BumilKu yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diberikan kepada Dinas Kesehatan sebagai implementasi yang diselenggarakan di setiap UPTD Puskesmas Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah tersebut pada tahun 2019 untuk pembuatan *server*, sedangkan pada tahun 2012 biaya tersebut digunakan untuk penyempurnaan aplikasi BumilKu.

2.2.2 Sumber Daya Finansial Implementasi Aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan

Sedangkan pelaksanaan operasional aplikasi pelayanan BumilKu di Kecamatan Nanggulan menggunakan anggaran yang berbeda yaitu menggunakan Biaya Operasional Kesehatan (BOK). Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kartika :

“Untuk pelayanan aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan, kami menggunakan BOK meliputi berbagai macam pelayanan kepada ibu hamil dan memberikan biaya pelaksanaan dilapangan untuk Kader BumilKu ditingkat Dusun”

GAMBAR 3.7
BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN BUMILKU
UPTD PUSKESMAS NANGGULAN 2019

Implementasi yang diberikan
- Bumilku?

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Spt	Ok	Nov	Des	
10. Transport Kader	7.520.000		2.440.000			2.440.000		2.440.000					7.330.000
11. Pengembangan Komunitas Kader							8.000.000						8.000.000
12. Ketersediaan sarana di desa sasaran	8.000.000						3.000.000						3.000.000
13. Biaya alat bantu	1.000.000						7.200.000						2.200.000
14. Biaya alat bantu	2.250.000						500.000						300.000
15. Pengadaan Banner Penggabung	300.000						4.000.000						4.000.000
16. Transport peserta	4.000.000												
17. Makanan dan minuman	3.675.000												3.675.000
18. Transport peserta	3.250.000												3.250.000
19. Pemantauan dan evaluasi kegiatan	4.180.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.560.000
20. Transport Kader	1.750.000												1.750.000
21. Konsumsi peserta	2.400.000												2.400.000
22. Transport Peserta	300.000												300.000
23. Honor Narasumber	240.000												240.000
24. Pengadaan Materi	240.000												240.000
25. Raker Kelambu SR Tingkat Desa	3.120.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000								3.300.000
26. Konsumsi Peserta	4.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000								4.500.000
27. Transport Peserta	300.000												300.000
28. Honor Narasumber	400.000												400.000
29. Pengadaan Materi	400.000												400.000
30. Biaya perjalanan dinas petugas	400.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000
31. Konsumsi peserta	1.150.000												1.150.000
32. Transport Peserta	2.400.000												2.400.000
33. Honor Narasumber	300.000												300.000
34. ATK Peserta (blocknote, blockpoint)	480.000												480.000
35. Asah-Medik KB	700.000												700.000
36. Konsumsi Peserta	1.000.000												1.000.000
37. Transport Peserta	1.000.000												1.000.000
38. Pemantauan Balok GDI Tk Desa	4.000.000					2.310.000	2.310.000						4.620.000
39. Konsumsi Peserta	1.000.000					240.000	240.000						480.000
40. Biaya perjalanan dinas petugas	480.000												480.000
41. Peningkatan Kapasitas Jejaring													
42. Dukungan Pelayanan Kesehatan													
43. Transport Peserta	2.100.000				1.050.000								2.100.000
44. Konsumsi Peserta	3.000.000				1.500.000								3.000.000

Implementasi yang diberikan
- Bumilku?

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Spt	Ok	Nov	Des	
1. GPO (Growth)	2.520.000	270.000	380.000	380.000	380.000	270.000	380.000	270.000	220.000	270.000	220.000	220.000	2.520.000
2. Monitoring dan evaluasi	4.500.000												4.500.000
3. Monitoring dan evaluasi	78.210.000												78.210.000
4. Konsumsi peserta	4.500.000												4.500.000
5. Transport Kader	2.440.000		2.440.000										2.440.000
6. Makanan dan minuman	3.250.000												3.250.000
7. Transport peserta	480.000						4.720.000						6.720.000
8. Biaya perjalanan dinas petugas	480.000						480.000						480.000
9. Pemantauan dan evaluasi kegiatan	4.440.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.440.000
10. Konsumsi peserta	2.275.000												2.275.000
11. Transport Peserta	3.050.000												3.050.000
12. Honor Narasumber	300.000												300.000
13. ATK Peserta (blocknote, blockpoint)	610.000												610.000
14. Biaya perjalanan dinas petugas	1.280.000												1.280.000
15. Pemantauan dan evaluasi kegiatan	1.600.000												1.600.000
16. Transport Peserta	1.500.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
17. Peningkatan Data KUK ke RCI dan	880.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	880.000
18. Biaya perjalanan dinas petugas	880.000												880.000
19. Konsumsi peserta	5.250.000												5.250.000
20. Transport Peserta	6.500.000												6.500.000
21. Honor Narasumber	1.250.000												1.250.000
22. Costak Banner	225.000												225.000
23. Biaya perjalanan dinas petugas	400.000												400.000
24. Honor Narasumber	200.000												200.000
25. Pemantauan dan evaluasi kegiatan	200.000												200.000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengangan Ibu Hamil Did	2.400.000											2.400.000
a. Biaya Perawatan Dinas Petugas	2.400.000											2.400.000
Biaya Pengobatan Dinas Petugas	2.400.000											2.400.000
23 a. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	2.400.000											2.400.000
23 b. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	2.400.000											2.400.000
24 a. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	40.000											40.000
24 b. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	40.000											40.000
25 a. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	1.225.000											1.225.000
25 b. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 c. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 d. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 e. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 f. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 g. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 h. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 i. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 j. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 k. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 l. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 m. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 n. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 o. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 p. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 q. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 r. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 s. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 t. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 u. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 v. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 w. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 x. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 y. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
25 z. Biaya Pengobatan Dinas Petugas	80.000											80.000
J U M L A H	118.190.000											118.190.000
B. PROMKES												
1. Advokasi pemeliharaan dana desa untuk kegiatan UKM	1.750.000											1.750.000
a. Konsumsi	2.100.000											2.100.000
b. Transportasi peserta	600.000											600.000
c. Honor Narasumber												
2. Pengalihan CTPO ke masyarakat desa	7.350.000											7.350.000
a. Konsumsi peserta	540.000											540.000
b. SPPD golongan III												
c. Biaya katering	2.275.000											2.275.000
d. Konsumsi peserta	3.100.000											3.100.000
e. Transportasi peserta	300.000											300.000
f. Honor Narasumber	130.000											130.000
g. Pengalihan modal												
4. Biaya PHBS bagi kader pendata PHBS Tatanan Rumah Tangga	2.275.000											2.275.000
J U M L A H	2.275.000											2.275.000

Dari hasil wawancara dan pada gambar 3.7 diatas merupakan sumber daya finansial yang digunakan, sumber daya finansial atau anggaran yang digunakan untuk operasionalisasi dilapangan aplikasi BumilKu di Kecamatan Nanggulan menggunakan dana yang berbeda. Dana tersebut berupa Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dari UPTD Puskesmas Nanggulan sendiri, BOK tersebut melingkupi kegiatan lainnya berupa Kelambu Siti. BOK juga sumber daya anggaran bagi UPTD Puskesmas Nanggulan untuk biaya transport bagi Kader BumilKu untuk membantu kegiatan bidan ditingkat Dusun. Pembayaran bagi kader BumilKu dari anggaran BOK, UPTD Puskesmas Nanggulan membayar kader BumilKu dilakukan pada akhir tahun.

Dari indikator sumber daya finansial dan anggaran implementasi maupun pelaksanaan aplikasi BumilKu khususnya di UPTD Puskesmas Nanggulan memiliki sumber daya finansial yang berbeda. Kegunaan masing-masing dari sumber daya finansial aplikasi BumilKu juga berbeda baik yang digunakan

pihak implementor maupun pihak pelaksana aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan.

Sumber daya finansial dari pihak implementor maupun pelaksana yakni UPTD Puskesmas Nanggulan dengan keadaan yang sudah jelas. Sumber daya finansial tersebut mempengaruhi pada variabel prinsip pelayanan pada indikator kejelasan petugas pelayanan. Biaya operasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh kader BumilKu dalam membantu bidan ditingkat Dusun berasal dari BOK BumilKu UPTD Puskesmas Nanggulan.

2.3 Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan/program bisa meliputi berupa bangunan, lahan dan sarana lainya yang memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan/program. Dari hal ini terlihat dengan hasil wawancara terkait dengan sumberdaya peralatan aplikasi BumilKu, dimana dilakukan wawancara bersama Ibu Dyah :

“Untuk sumberdaya peralatan yang digunakan dalam implementasi maupun operasional Aplikasi BumilKu berupa puskesmas per-kecamatan untuk penanganan ibu hamil dan ada juga posyandu desa, serta smartphone pribadi yang digunakan untuk mengakses suatu data/rekamedis ibu hamil melalui aplikasi BumilKu”

GAMBAR 3.8
GEDUNG UPTD PUSKESMAS NANGGULAN



Analisis sumber daya peralatan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi maupun implementasi aplikasi BumilKu tidak memerlukan beberapa sumber daya peralatan. Sumber daya peralatan guna menunjang implementasi aplikasi BumilKu berupa *smartphone* guna memberikan pelayanan ibu hamil yang berada didalam aplikasi BumilKu. Penggunaan *smartphone* dalam hal ini digunakan oleh bidan sebagai admin, dan kader sebagai pendukung bidan digunakan untuk mengecek atau memeriksa keadaan ibu hamil dan melakukan pendaftaran aplikasi BumilKu. Serta penggunaan peralatan lainnya berupa puskesmas ditingkat Kecamatan, puskesmas tersebut digunakan sebagai pelayanan rawat jalan bagi ibu hamil disegala kondisi baik ibu hamil normal, beresiko hingga persalinan.

Sumber daya peralatan dengan keadaan yang sudah baik dan ada, hal tersebut mempengaruhi variabel implementasi aplikasi BumilKu di Kecamatan

Nanggulan sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Parameter yang dipengaruhi oleh sumber daya peralatan ini berupa parameter akurasi yang menampilkan fitur mapping titik koordinat yang tersedia pada aplikasi BumilKu yang tercantum pada gambar 3.1. Selain parameter itu, sumber daya peralatan juga mempengaruhi parameter kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan oleh pelaksana aplikasi BumilKu.

2.4 Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lainnya yang cukup penting guna menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan/program. Kewenangan yang dimiliki untuk membuat suatu keputusan yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu untuk melaksanakan suatu kebijakan/program. Pelaku utama implementasi aplikasi BumilKu dari Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *development server* aplikasi BumilKu, badan selaku pelaksana aplikasi pelayanan BumilKu dilapangan dan kader BumilKu dari masyarakat harus diberikan wewenang yang cukup untuk membuat suatu keputusan dalam melaksanakan aplikasi BumilKu yang menjadi kewenangannya. Kewenangan Dinas Kesehatan sebagai implementor BumilKu ada beberapa sebagaimana dari hasil wawancara dengan Ibu Dyah :

“Kewenangan dari kami (implementor) terhadap aplikasi BumilKu berupa mengembangkan aplikasi BumilKu melalui kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, kami memiliki suatu cara untuk menemukan solusi bilamana ada permasalahan dalam operasional aplikasi BumilKu, dan berwenang untuk melakukan monitoring evaluasi setiap bulannya kepada badan/admin aplikasi BumilKu dan memberikan surat perjalanan maupun laporan kepada badan/admin”

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis, bahwa sumber daya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan selaku implementor aplikasi BumilKu yaitu mampu menjamin pelaksanaan BumilKu dengan optimal. Dan memiliki kewenangan berupa adanya kegiatan *monitoring evaluasi* maupun pendidikan/penyuluhan kepada bidan/admin dan kader yang dilaksanakan setiap bulannya untuk mengetahui kekurangan maupun kendala dilapangan. Serta memiliki kewenangan untuk memberikan surat perjalanan dan laporan dinas kepada bidan yang melaksanakan aplikasi pelayanan BumilKu secara langsung kepada masyarakat yang langsung turun kelapangan.

Sumber daya kewenangan berbeda dari Dinas Komunikasi dan Informatika selaku *development server* aplikasi pelayanan BumilKu. Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Arita selaku Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informatika :

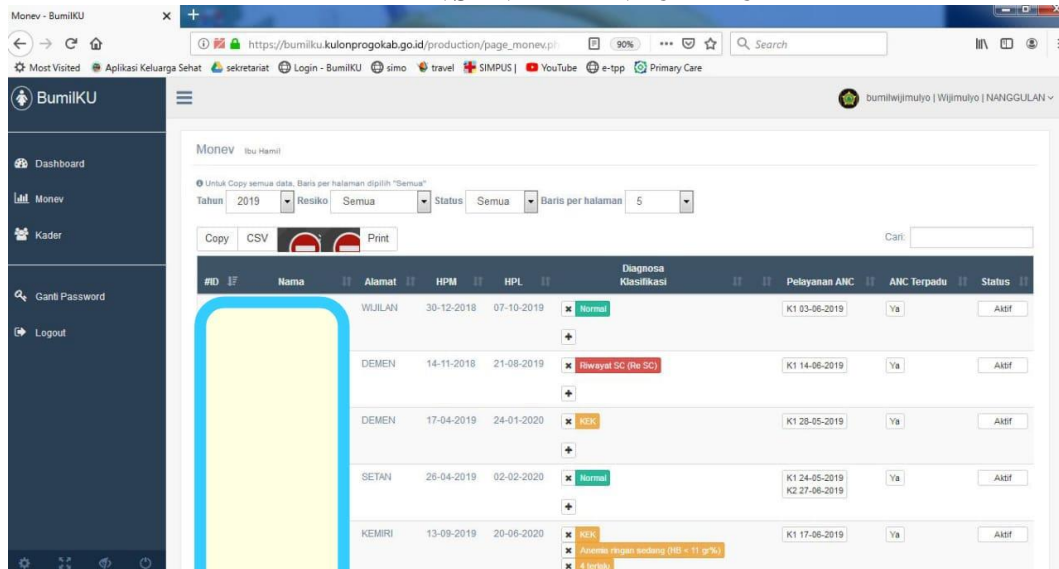
“kewenangan Diskominfo dalam aplikasi pelayanan BumilKu hanya sebagai *development server*, kestabilan dan keamanannya”

Hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam parameter sumber daya kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku *development server* hanya yang berkaitan dengan *server* dari aplikasi pelayanan BumilKu berupa memberikan kestabilan dan keamanan dalam penggunaan aplikasi BumilKu yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di lingkup Kabupaten Kulon Progo.

Sumber daya kewenangan yang dimiliki dari bidan selaku admin dengan kader aplikasi BumilKu berbeda satu sama lainnya. Berikut hasil wawancara dengan Mbak Putri :

“kewenangan bidan dalam aplikasi BumilKu yaitu memberikan pelayanan secara langsung kepada ibu hamil sedangkan kewenangan dari kader aplikasi BumilKu hanya memiliki kewenangan untuk mendaftarkan bagi ibu hamil yang ingin menggunakan aplikasi BumilKu”

GAMBAR 3.9
TAMPILAN SERVER BIDAN BUMILKU



The screenshot displays the BumilKu application interface. The main content area shows a table of pregnancy records for a user named 'Monev'. The table has columns for #ID, Nama, Alamat, HPM, HPL, Diagnosa Klasifikasi, Pelayanan ANC, ANC Terpadu, and Status. A yellow highlight is present on the left side of the table, and a blue highlight is on the top-left corner of the table area.

#ID	Nama	Alamat	HPM	HPL	Diagnosa Klasifikasi	Pelayanan ANC	ANC Terpadu	Status
	WULIAN		30-12-2018	07-10-2019	Normal	K1 03-06-2019	Ya	Aktif
	DEMEN		14-11-2018	21-08-2019	Riboviral SC (Ru SC)	K1 14-06-2019	Ya	Aktif
	DEMEN		17-04-2019	24-01-2020	REN	K1 28-05-2019	Ya	Aktif
	SETAN		26-04-2019	02-02-2020	Normal	K1 24-05-2019 K2 27-06-2019	Ya	Aktif
	KEMIRI		13-09-2019	20-06-2020	REN Anemia ringan sedang (Hb < 11 g%) 4 trimester	K1 17-06-2019	Ya	Aktif

Dapat dianalisis bahwa sumber daya kewenangan bidan dengan kader aplikasi BumilKu berbeda. Kewenangan yang dimiliki oleh bidan berupa dalam perihal mengakses aplikasi BumilKu maupun memberikan pelayanan dan penanganan secara langsung kepada ibu hamil yang berkaitan rekam medis ibu hamil tersebut.

GAMBAR 3.10
TAMPILAN SERVER KADER BUMILKU

Pemantauan - BumilKU

https://bumilku.kulonprogo.go.id/production/page_pemantaian

kaderfemanggal | Wijimulyo | NANGGULAN

Pemantauan Ibu Hamil

+ Masukkan Data

Tanggal HPM yang kosong tidak terampil, kecuali Tahun dipilih "Semua"

Untuk Copy semua data, Baris per halaman dipilih "Semua"

Tahun: 2019

Copy CSV Print

#ID	Nama	Alamat Domisili	Gol. Darah	HPM	HPL	Riwayat Kehamilan			Jamkes	Aksi
						G Kehamilan ku	P Jml melahirkan	A Jml abortus		
	TEMANGGAL, Wijimulyo, NANGGULAN		A	09-01-2019	16-10-2019	1	0	0	JKN Non PBI	[Edit] [Hapus]
	TEMANGGAL, Wijimulyo, NANGGULAN		B	05-12-2018	13-09-2019	1	0	0	Umum	[Edit] [Hapus]
	TEMANGGAL, Wijimulyo, NANGGULAN		AB	19-12-2018	26-09-2019	2	1	0	JKN PBI	[Edit] [Hapus]

Sedangkan kader yaitu dari masyarakat untuk menangani atau membantu ibu hamil ditingkat Dusun, yang diberikan pelatihan/pendidikan mengenai aplikasi BumilKu hanya memiliki kewenangan untuk membantu ibu hamil dalam pendaftaran aplikasi pelayanan BumilKu dan dibatasi dalam mengakses aplikasi BumilKu.

Analisis dari parameter sumber daya kewenangan yang berhubungan dengan aplikasi BumilKu memiliki kewenangannya masing-masing dalam menjalankan implementasi maupun operasional pelayanan aplikasi BumilKu di lapangan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada ibu hamil selaku target *group* dari aplikasi BumilKu di Kabupaten Kulon Progo. Sumber daya kewenangan juga mempengaruhi dalam kejelasan petugas pelayanan aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan yang sudah memiliki kejelasan dalam memberikan pelayanan.

Dari penggunaan *server* aplikasi BumilKu juga bidan dan kader memiliki kewenangan berbeda. Untuk *server* yang digunakan oleh bidan terdapat monev untuk diberikan evaluasi oleh pihak puskesmas, diagnosa klasifikasi untuk melihat rekam medis ibu hamil dan kandungan, serta ada bagian pelayanan untuk mengetahui jumlah pelayanan yang didapat oleh ibu hamil. Sedangkan *server* dari kader BumilKu hanya meliputi pendaftar bagi ibu hamil yang ingin terdaftar dalam aplikasi BumilKu, riwayat kesehatan untuk mengetahui tingkat resiko ibu hamil.

Analisis dari sumber daya kewenangan yang dimiliki oleh bidan dan kader berbeda satu sama lain. Baik dalam pelaksanaan pelayanan dilapangan langsung dengan ibu hamil, maupun kewenangan lainnya berupa penggunaan *server* aplikasi BumilKu juga. Sumber daya kewenangan ini dengan keadaan yang baik, sumber daya kewenangan mempengaruhi kejelasan petugas pelayanan dalam melakukan tugas dan kinerjanya dilapangan.

3. Disposisi (Sikap)

Parameter ini beranggapan bahwa disposisi dimana dapat diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan/program untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan/program secara sungguh-sungguh sehingga menjadi kebijakan/program dapat terwujud.

3.1 Disposisi Dari Implementor Aplikasi BumilKu

Salah satu keinginan atau program dari Bupati Kulon Progo Bapak Hasto Wardoyo memiliki keinginan untuk menurunkan angka kematian ibu hamil di

Kabupaten Kulon Progo yang berkerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan untuk mengadakan aplikasi yang melayani ibu hamil yaitu aplikasi BumilKu. Disposisi Dinas Kesehatan dalam implementasi aplikasi BumilKu dari hasil wawancara dengan Ibu Dyah sebagai berikut :

“Sikap atau kemauan dari kami (implementor) terhadap aplikasi BumilKu ini masih mencoba mengembangkan hingga memiliki output yang diinginkan berupa menurunkan angka kematian ibu hamil atau bayi baru lahir dan kesehatan ibu hamil setelah melahirkan di Kabupaten Kulon Progo dengan memberikan pelayanan yang optimal, efektif dan efisien.. Salah satu caranya dengan rencana mengembangkan rekam medis ibu hamil serta memiliki keinginan dengan melibatkan RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang untuk penanganan selanjutnya.”

Pada dasarnya keinginan *output* dari pelayanan aplikasi BumilKu untuk menurunkan angka kematian di Kabupaten Kulon Progo. Selain untuk menurunkan angka kematian ibu hamil keinginan berupa memberikan pelayanan yang optimal, efektif dan efisien dengan menggunakan aplikasi pelayanan BumilKu yang berbasis informatika. Untuk lebih terorganisir dengan pihak-pihak dibidang kesehatan lainnya, Dinas Kesehatan memiliki keinginan untuk berkerjasama dalam penanganan ibu hamil yang terdaftar dalam aplikasi BumilKu dengan RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang. Rencana tersebut baru disusun pada tahun 2019 dan memiliki target terealisasi pada tahun 2020 mendatang.

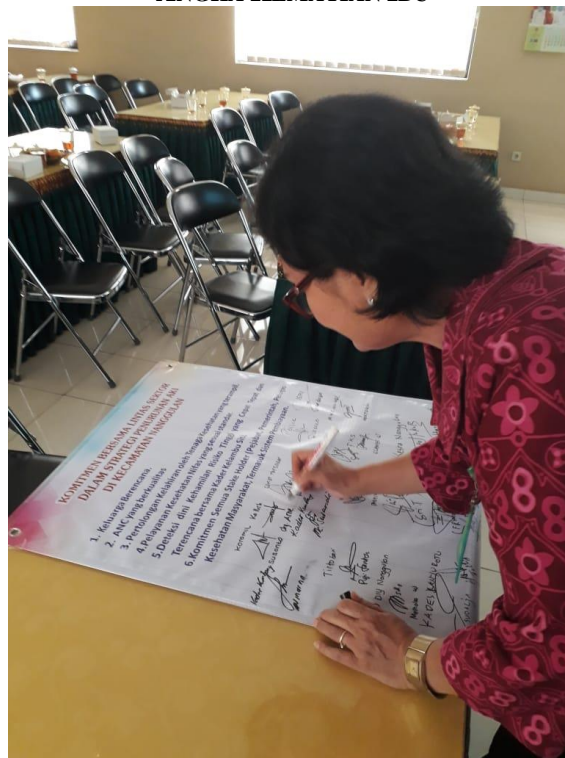
3.2 Disposisi Dari UPTD Puskesmas Nanggulan

Sedangkan disposisi yang diberikan oleh pelaksanaan aplikasi pelayanan BumilKu di UPTD Puskesmas Kecamatan Nanggulan yaitu memiliki kesamaan keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kartika :

“kami memiliki keinginan untuk menurunkan angka kematian ibu hamil dengan adanya program kegiatan inovasi Kelambu Siti atau Kelompok Penyelamatan Ibu Hamil resiko tinggi, kegiatan tersebut dicoba digabungkan dengan aplikasi pelayanan BumilKu.”

Rangkaian kegiatan inovasi Kelompok Penyelamat Ibu Hamil Resiko tinggi (Kelambu Siti) di puskesmas Nanggulan sudah ada sejak tahun 2013. Kegiatan tersebut diimplementasikan dengan aplikasi pelayanan BumilKu dengan menggunakan metode kader ditingkat Dusun dan menggunakan model titik koordinat seperti pada sub pembahasan Implementasi BumilKu variabel komunikasi pada bagian parameter akurasi untuk memudahkan dalam pemantauan ibu hamil.

GAMBAR 3.11
KOMITMEN UPTD PUSKESMAS NANGGULAN DALAM MENURUNKAN
ANGKA KEMATIAN IBU



SUMBER: [HTTPS://PUSKESMASNANGGULAN.COM/GALLERY/](https://puskesmasnanggulan.com/gallery/)

Analisis dari indikator Disposisi baik dari implementor (Diskominfo, Dinkes) selaku implementor maupun dari pihak pelaksana ditingkat Kecamatan UPTD Puskesmas Nanggulan memiliki keinginan untuk menurunkan angka kematian ibu hamil di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya inovasi yang dikeluarkan oleh implementor (Diskominfo, Dinkes) berupa aplikasi yang melayani ibu hamil melalui *e-Government* yang berbasis aplikasi untuk dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas ditingkat Kecamatan. Sedangkan disposisi dari UPTD Puskesmas Nanggulan salah satu pelaksana aplikasi pelayanan BumilKu dengan cara menjalankan aplikasi tersebut dengan menggabungkan kegiatan Kelambu Siti dengan BumilKu yang dilaksanakan oleh kader ditingkat Dusun.

Hasil pembahasan disposisi (sikap) bahwa Dinas Kesehatan selaku implementor aplikasi BumilKu memiliki keinginan dari sudut pandang disposisi ini. Adanya keinginan tersebut, mengartikan bahwa implemntasi aplikasi BumilKu ini secara sungguh-sungguh serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam operasinal aplikasi BumilKu. Serta memiliki keinginan dari UPTD puskesmas Kecamatan Nanggulan untuk menurunkan kasus kematian ibu hamil dengan penggabungan kegiatan kelambu siti dengan aplikasi BumilKu.

Disposisi dari UPTD Puskesmas Nanggulan dengan keadaan yang sudah baik, dari disposisi tersbut mempengaruhi adanya peran kader BumilKu di Kecamatan Nanggulan yang membantu kinerja dari bidan BumilKu.

4. Struktur Birokrasi

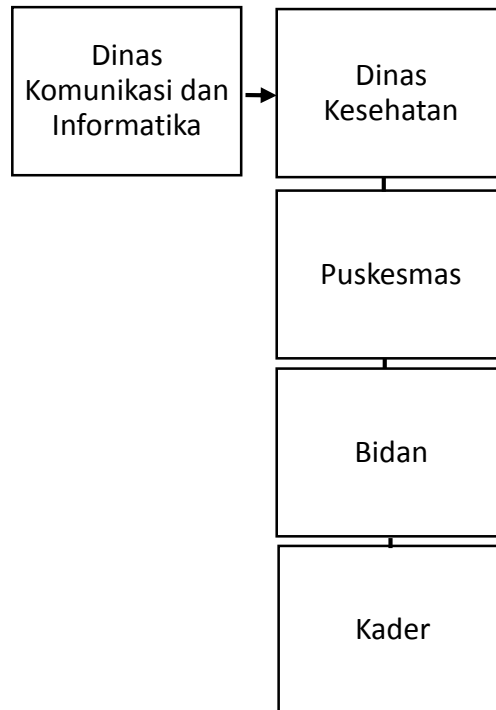
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan suatu kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi. Salah satu struktur penting dalam organisasi adalah prosedur operasi. (*Standard Operating Procedures* atau *SOP*) SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Berikut merupakan struktur birokrasi dan SOP aplikasi BumilKu Kabupaten Kulon Progo :

4.1 Struktur Birokrasi Implementasi Aplikasi BumilKu

Untuk mengimplementasikan suatu program/aplikasi BumilKu serta bagaimana cara melakukannya, dan memiliki keinginan untuk melakukannya. Struktur birokrasi merupakan hal penting lainnya dalam implementasi, yang mencakup aspek-aspek berupa struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan lain sebagainya. Dalam wawancara peneliti dengan Ibu Arita selaku Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo :

“Dalam tahap implementasi maupun pelaksanaan aplikasi pelayanan BumilKu cukup banyak yang terkait dalam kegiatan program/aplikasi ini.”

TABLE 3.3
ALUR STRUKTUR BIROKRAS APLIKASI BUMILKU



Dalam alur struktur birokrasi diatas merupakan implementor dan pelaksana aplikasi BumilKu di Kabupaten Kulon Progo. Penjelasan sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika : Memiliki peranan sebagai *development server* serta dan penanggung jawab terhadap keamanan *server* aplikasi BumilKu;
- b. Dinas Kesehatan : Sebagai implementor dan pengusung aplikasi BumilKu serta penanggung jawab terhadap operasional pelayanan aplikasi BumilKu;
- c. Puskesmas : Bagian puskesmas sebagai penanggung jawab pelayanan aplikasi BumilKu terhadap Dinas Kesehatan serta penanggung jawab pelayanan aplikasi BumilKu ditingkat Kecamatan;

- d. Bidan : Bidan sebagai pelaksana/admin aplikasi BumilKu secara langsung turun kelapangan pemberi pelayanan terhadap ibu hamil;
- e. Kader : Merupakan masyarakat yang dipilih/diberikan pendidikan tentang Aplikasi BumilKu, yang ditugaskan dilingkup Dusun dan memiliki tugas untuk membantu ibu hamil dalam pendaftaran bagi ibu hamil yang ingin menggunakan aplikasi BumilKu.

Struktur birokrasi implementasi aplikasi BumilKu cukup jelas bagaimana dari pihak implementor yaitu dua Dinas yang bersangkutan satu sama lain antara Dinas Komunikasi dan Informasi dengan Dinas Kesehatan. Peran kedua Dinas tersebut memiliki kegiatan masing-masing namun memiliki tujuan yang sama yaitu mengimplementasikan aplikasi BumilKu di kabupaten Kulon Progo, tugas dari kedua Dinas tersebut mensosialisasikan aplikasi BumilKu ke setiap puskesmas Kecamatan.

Dari pihak puskesmas ditugaskan untuk mensosialisasikan kepada bidan-bidan mengenai pelayanan ibu hamil dengan menggunakan aplikasi BumilKu, serta melakukan *monitoring evaluasi* kepada bidan yang dipilih sebagai admin aplikasi BumilKu. Sedangkan pelaksana aplikasi BumilKu di lapangan yaitu tugas dari bidan/admin yang ditunjuk serta diberikan pendidikan mengenai aplikasi BumilKu untuk melakukan pelayanan kepada ibu hamil dan bertanggung jawab serta dimonitoring dan evaluasi oleh pihak puskesmas.

Dari pihak kader yaitu masyarakat umum sendiri yang dipilih atau diberikan pendidikan mengenai aplikasi BumilKu oleh pihak puskesmas, guna

membantu bidan untuk mengawasi ibu hamil yang menggunakan aplikasi pelayanan BumilKu serta membantu ibu hamil bilamana ada yang ingin mendaftar/menggunakan aplikasi BumilKu.

Struktur alur birokrasi tersebut faktor yang paling penting dalam suatu implementasi, struktur alur birokrasi yang berkaitan dengan BumilKu sudah dalam keadaan yang baik. Struktur alur BumilKu juga mempengaruhi kejelasan petugas pelayanan BumilKu ditingkat Kabupaten Kulon Progo sampai ditingkat pelaksana pelayanan di UPTD Puskesmas Nanggulan.

4.2 Standard Operational Procedure (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal seperti kepastian, waktu, sumber daya, dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan/program diperlukannya SOP. Sebagai pedoman bagi setiap implementor kebijakan/program.

4.2.1 Standard Operational Procedure Development Server Aplikasi BumilKu

Dari Dinas Komunikasi dan Informatika selaku *development server* aplikasi BumilKu memiliki SOP yang berbeda dengan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara aplikasi pelayanan BumilKu dan pihak penyesuaian kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan pelayanan aplikasi BumilKu. Berikut hasil wawancara penulis dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang diwakili oleh ibu Arita :

“Dalam implementasi aplikasi BumilKu, Diskominfo berpedoman pada Perbup No. 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government sebagai pedoman untuk aplikasi BumilKu.”

Dari hasil wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersangkutan dengan aplikasi BumilKu memiliki SOP sendiri. SOP yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Peraturan Bupati Kulon Progo No.101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *e-Government* yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu penyelenggaraan *e-Government* memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengadakan suatu program yang berhubungan dengan penyelenggaraan *e-Government* seperti yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan elektronik wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan informatika. Seperti salah satunya adalah aplikasi pelayanan BumilKu. Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara aplikasi pelayanan BumilKu memiliki kewajiban seperti halnya terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) berupa :

- a. menyediakan layanan elektronik sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. menjamin keberlanjutan operasional layanan elektronik;
- c. menjamin keterpaduan dan interoperabilitas sistem yang digunakan;
dan;
- d. menjamin keamanan informasi sistem secara internal.

SOP yang digunakan sebagai pedoman aplikasi BumilKu yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebatas sebagai pedoman dalam development server BumilKu yang dikoordinator oleh Dinas Kesehatan.

4.2.2 Standard Operational Procedure Implementasi Aplikasi BumilKu Dinas Kesehatan

Dari Dinas Kesehatan selaku implementor aplikasi BumilKu di Kabupaten Kulon Progo memiliki SOP yang bisa dikatakan baru, Berikut hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Dyah :

“SOP kami untuk BumilKu yaitu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor.188.4/7676 tentang Penunjukan Tim dan Penunjukan Sistem Aplikasi BumilKu Dalam Upaya Akselerasi Penurunan AKI dan AKB tahun 2018. Namun masih memiliki kendala berupa masih belum disahkan oleh Pemerintahan Daerah Kulon Progo. Karena Masih Harus dikaji lebih jauh mengenai aplikasi BumilKu ini.”

SOP tersebut untuk menjadi pedoman dalam aplikasi pelayanan BumilKu di Kabupaten Kulon Progo dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor.188.4/7676 tentang Penunjukan Tim dan Penunjukan Sistem Aplikasi BumilKu Dalam Upaya Akselerasi Penurunan AKI dan AKB tahun 2018. Namun masih belum resmi disahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Namun dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sejak awal tahun 2019 salah satunya di Kecamatan Nanggulan yang selangkah lebih maju dari Kecamatan lainnya.

4.2.3 Standard Operational Procedure Pelayanan Aplikasi BumilKu UPTD Puskesmas Nanggulan

Sedangkan SOP untuk pelayanan aplikasi BumilKu di UPTD Puskesmas Nanggulan menggunakan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor.188.4/7676 tentang Penunjukan Tim dan Penunjukan

Sistem Aplikasi BumilKu Dalam Upaya Akselerasi Penurunan AKI dan AKB tahun 2018. Berikut wawancara dengan ibu Ika sebagai berikut :

“Untuk SOP implementasi serta pelayanan aplikasi BumilKu kami berpedoman pada draft namun belum disahkan dan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor.188.4/7676). Untuk SOP dari bidan/admin berbeda dengan SOP kader.”

GAMBAR 3.12
SOP BIDAN BUMILKU

The image shows two pages of a Standard Operating Procedure (SOP) document for health workers using the BumilKu application. The left page is the title page and table of contents, while the right page is the main procedure flowchart.

Page 1: Title and Table of Contents

STATUS DOKUMEN ASLI SALINAN

PENGUNAAN APLIKASI BUMILKU OLEH BIDAN DESA

SOP

No. Dokumen : UKM/KIA/SOP/032/9/19
No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 27 September 2019
Halaman : 1/2

PUSKESMAS NANGGULAN

drg. Anie Mursilastuti, M. Kes
NIP. 19621001 199303 2 001

1. Pengertian Aplikasi Bumilku adalah aplikasi berupa pendataan dan pemantauan terhadap Ibu Hamil Di Kulon Progo

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk Bidan Desa dalam memasukkan data didalam Aplikasi Bumilku

3. Kebijakan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 188.4 / 7676 Tentang Penunjukan Tim dan Pemberlakuan Sistem Aplikasi Bumilku Dalam Upaya Akselerasi Penurunan AKI dan AKB Tahun 2018

4. Referensi

5. Prosedur/Langkah-langkah

1. Bidan Desa membuka browser kemudian menuliskan alamat website bumilku : <http://bumilku.kulonprogo.kab.go.id/>
2. Bidan Desa Login kemudian memasukkan username dan password
3. Bidan Desa dapat melihat tampilan pemetaan ibu hamil di wilayah masing-masing dengan melihat Dashboard. Apabila ada ibu hamil yang belum terdaftar dalam aplikasi, bidan juga dapat menambahkan data di pendaftaran dan pemantauan.
4. Bidan Desa memasukkan data ibu hamil baru di menu Pendaftaran kemudian klik icon **Masukkan Data**
5. Bidan Desa memasukkan data NIK, Nama ibu, nama suami, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, tanggal lahir, alamat KTP, alamat domisili, desa domisili dan nomor telepon ibu hamil kemudian klik icon **Simpan**
6. Bidan Desa memasukkan data ibu hamil di pemantauan dengan klik icon **Masukkan Data Pemantauan**
7. Bidan Desa klik icon **🔍** untuk mencari nama ibu hamil yang

Gambar 3.12 merupakan SOP aplikasi pelayanan BumilKu dari bidan sebagai pemberi pelayanan dan penanggung jawab rekam medis ibu hamil dan kandungan. Dalam pelayanan yang diberikan sama dengan bidan pada umumnya, bidan memberikan pelayanan secara langsung kepada ibu hamil dengan opsi mengunjungi rumah ibu hamil dengan memantau titik koordinat map seperti pada gambar 3.1.

Dalam SOP bidan BumilKu, bidan bisa melihat tampilan pemetaan ibu hamil pada wilayahnya masing-masing dengan melihat dashboard. Bidan juga mencari ibu hamil yang ingin dimasukkan data pemantauan kemudian diisi data HPM, HPL jaminan kesehatan dan riwayat kehamilan dan persalinan ibu hamil. Bidan desa bisa memasukan diagnosa, tanggal kunjungan ibu hamil, pelayanan ANC terpadu dan status ibu hamil untuk mengetahui perpindahan ibu hamil atau sudah melahirkan.

GAMBAR 3.13
SOP KADER BUMILKU

The image shows two pages of a Standard Operating Procedure (SOP) for the BumilKu application. The left page is the title page, and the right page is the flowchart section.

Page 1: Title and Metadata

- STATUS DOKUMEN:** ASLI SALINAN
- PENGUNAAN APLIKASI BUMILKU OLEH KADER KELAMBU SITI**
- No. Dokumen:** UKM/KIA/SOP/033/9/19
- No. Revisi:** 00
- Tanggal Terbit:** 27 September 2019
- Halaman:** 1 / 2
- PUSKESMAS NANGGULAN:** drg. Anie Mursiastuti, M. Kes NIP. 19621001 199303 2 001

Table of Contents:

1. Pengertian	Aplikasi Bumilku adalah aplikasi berupa pendataan dan pemantauan terhadap Ibu Hamil Di Kulon Progo.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk Kader Kelambu Siti dalam memasukkan data didalam Aplikasi Bumilku
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 188.4 / 7676 Tentang Penunjukan Tim dan Pemberlakuan Sistem Aplikasi Bumilku Dalam Upaya Akselerasi Penurunan AKI dan AKB Tahun 2018
4. Referensi	
5. Prosedur/Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader Kelambu Siti membuka browser kemudian menuliskan alamat website bumilku : http://bumilku.kulonprogo.kab.go.id/ 2. Kader Kelambu Siti Login kemudian memasukkan username dan password 3. Kader Kelambu Siti dapat melihat tampilan pemetaan ibu hamil di wilayah masing-masing dengan melihat Dashboard 4. Kader Kelambu Siti memasukkan data ibu hamil baru di menu Pendaftaran kemudian klik icon Masukkan Data 5. Kader Kelambu Siti memasukkan data NIK, Nama ibu, nama suami, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, tanggal lahir, alamat KTP, alamat domisili, desa domisili dan nomor telepon ibu hamil kemudian klik icon Simpan 6. Kader Kelambu Siti menentukan titik koordinat rumah ibu hamil dengan klik icon 📍 kemudian di klik 📍 kemudian akan secara otomatis keluar titik koordinat ibu lalu klik simpan

Page 2: Diagram Alir (Flowchart)

7. Kader Kelambu Siti memasukkan data ibu hamil di pemantauan dengan klik icon **Masukkan Data Pemantauan**
8. Kader Kelambu Siti klik icon **🔍** untuk mencari nama ibu hamil yang ingin dimasukkan dalam data pemantauan kemudian diisi data HPM, HPL, Jaminan Kesehatan, dan riwayat kehamilan dan persalinan ibu hamil kemudian klik icon **Simpan**
9. Kader Kelambu Siti keluar dari Aplikasi dengan klik icon **Logout**

6. Diagram Alir

```

    graph TD
      A[Kader membuka browser kemudian menuliskan alamat website bumilku : http://bumilku.kulonprogo.kab.go.id/] --> B[Kader Login kemudian memasukkan username dan password]
      B --> C[Kader dapat melihat tampilan pemetaan ibu hamil di wilayah masing-masing dengan melihat Dashboard]
      C --> D[Kader memasukkan data ibu hamil baru di menu Pendaftaran kemudian klik icon Masukkan Data]
      D --> E[Kader memasukkan data NIK, Nama ibu, nama suami, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, tanggal lahir, alamat KTP, alamat domisili, desa domisili dan nomor telepon ibu hamil kemudian klik icon Simpan]
      E --> F[Kader menentukan titik koordinat rumah ibu hamil dengan klik icon 📍 kemudian di klik 📍 kemudian akan secara otomatis keluar titik koordinat ibu]
      F --> G[Kader memasukkan data ibu hamil di pemantauan dengan klik icon Masukkan Data Pemantauan]
      G --> H[Kader klik icon 🔍 untuk mencari nama ibu hamil yang ingin dimasukkan dalam data pemantauan kemudian diisi data HPM, HPL, Jaminan Kesehatan, dan riwayat kehamilan dan persalinan ibu hamil kemudian klik icon Simpan]
      H --> I[Kader melihat Data ibu hamil yang sudah dimasukkan dalam pendaftaran dan pemantauan pada menu Menu]
      I --> J[Kader keluar dari Aplikasi dengan klik icon Logout]
  
```

7. Unit Terkait: KIA
8. Dokumen Terkait:
9. Lampiran:

Gambar 3.10 merupakan SOP aplikasi pelayanan BumilKu dari kader ditingkat Dusun sebagai pembantu kinjara bidan ditingkat Desa untuk pendaftaran ibu hamil, pemantau ibu hamil, jaminan kesehatan, dan persalinan ibu hamil. Server kader BumilKu seperti pada gambar 3.8 hanya tersedia untuk pendaftaran dan pemantauan.

Untuk mengakses aplikasi BumilKu, kader memiliki SOP dan ketentuannya berupa dalam pendaftaran ibu hamil memasukan data diri untuk menentukan titik koordinat rumah ibu hamil kemudian dengan begitu akan secara otomatis keluar titik koordinat ibu hamil. Kader juga bisa mencari ibu hamil yang ingin dimasukan dalam data pengetahuan kemudian diisikan data HPM, HPL, jaminan kesehatan, dan riwayat kehamlan dan persalinan ibu hamil.

Berbeda dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan mengacu SOP nya pada sebuah draft yang berkaitan dengan pelyanan aplikasi BumilKu yang belum disahkan dan KAK, dikarenakan aplikasi BumilKu ini baru berjalan 2 tahun terakhir. Hal tersebut menjadi penghambat dalam parameter kejelasan petugas yang kurang jelasnya nama bidan/admin dan jabatan yang memberikan pelayanan BumilKu dilapangan

Hasil analisis variabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi BumilKu yang menggunakan teori George C. Edward III ini bisa dikatakan sudah tersusun dengan rapih dan memiliki tujuan yang sama antara satu sama lain oleh pihak implementor dengan pelayanan aplikasi BumilKu, dan kesiapan dari pihak-pihak lainnya untuk melaksanakan pelayanan aplikasi BumilKu. Namun kekurangan yang ada pada variabel faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi aplikasi BumilKu terdapat pada indikator struktur birokrasi berupa SOP dari pihak implementor (Diskominfo,Dinkes), hal tersebut disebabkan karena masih belum di sahkannya draft sebagai pedoman implementasi BumilKu oleh pemerintah daerah

Kabupaten Kulon Progo. Namun, dalam hal tersebut tidak mempengaruhi dalam pelaksanaannya di UPTD Puskesmas Nanggulan, dikarenakan dalam pelaksanaannya UPTD Puseksmas Nanggulan memiliki SOP sendiri berupa KAK.